

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah didapatkan dan dijelaskan dalam hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Upaya yang dilakukan sekolah dalam membangun Sekolah Responsif Gender (SRG) dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Merdeka yaitu sosialisasi Pendidikan Responsif Gender (PRG), pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, penguatan kapasitas guru dan tenaga pendidik melalui pelatihan *In House Training* (IHT), penyusunan program Proyek Penguatan Profil Pemuda Pancasila (P5) yang sensitif gender, serta integrasi perspektif dalam modul ajar dan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
2. Indikator Sekolah Responsif Gender (SRG) dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa secara umum implementasi Kurikulum Merdeka telah mendukung terwujudnya praktik pendidikan yang lebih inklusif dan setara bagi siswa laki-laki dan perempuan. Keberhasilan tersebut terlihat dari adanya kesempatan yang sama bagi seluruh siswa dalam meraih prestasi akademik maupun nonakademik, seperti pada ajang OSN dan POPDA, yang proses seleksinya dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan, minat, dan bakat siswa tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Kesetaraan juga tercermin dalam mekanisme seleksi siswa untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang sepenuhnya didasarkan pada nilai akademik. Selain itu, lingkungan sekolah yang multikultural mampu menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai antarsiswa dengan latar belakang agama yang berbeda melalui berbagai kegiatan dialog dan interaksi sosial yang terbuka.

Keberhasilan pelaksanaan indikator sekolah responsif gender juga terlihat pada aspek kurikulum dan proses pembelajaran. Materi pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 7 Purworejo telah disusun dengan bahasa yang relatif netral gender serta tidak memperkuat stereotip peran laki-laki dan perempuan. Hal ini tampak secara khusus pada materi Sosiologi yang menempatkan siswa laki-laki dan perempuan sebagai subjek sosial yang setara serta mendorong siswa untuk

memahami isu ketimpangan gender secara kritis. Pada standar proses pembelajaran, guru juga telah memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi, bertanya, menyampaikan pendapat, serta mengambil keputusan dalam kerja kelompok. Pengelolaan kelas yang dilakukan guru menunjukkan adanya upaya menciptakan relasi belajar yang dialogis, partisipatif, dan tidak menunjukkan dominasi gender tertentu.

Meskipun demikian, pelaksanaan indikator sekolah responsif gender di SMA Negeri 7 Purworejo masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperkuat. Salah satunya terlihat pada tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran yang belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat siswa laki-laki maupun perempuan yang menunjukkan sikap ragu, malu, atau kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan di kelas. Selain itu, perbedaan capaian prestasi antara siswa laki-laki dan perempuan pada beberapa bidang juga menunjukkan adanya variasi minat dan kecenderungan aktivitas yang belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, meskipun penerapan sepuluh indikator sekolah responsif gender di SMA Negeri 7 Purworejo telah berjalan dengan baik dan mencerminkan prinsip kesetaraan, tetap diperlukan upaya penguatan melalui strategi pembelajaran yang lebih partisipatif serta pengembangan potensi siswa secara lebih merata agar nilai-nilai kesetaraan gender dapat terwujud secara lebih optimal dalam praktik pendidikan di sekolah.

3. Tantangan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 7 Purworejo yaitu, keterbatasan waktu dan pembuatan format penilaian yang beragam, terdapat guru yang telah berusia lanjut, terlalu banyak perubahan kebijakan dan administrasi, kurangnya kegiatan pelatihan secara *offline*, kesulitan dalam menemukan bahan untuk produk kegiatan P5, serta kurangnya solidaritas dan keaktifan antarteman dalam kegiatan P5.

## **B. Saran**

1. Secara Teoritis
  - a. Mengembangkan konsep sistem penilaian yang tidak hanya dipahami sebagai tuntutan administratif, tetapi sebagai bagian integral dari proses pembelajaran yang bermakna melalui model penilaian yang efisien, fleksibel,

dan berorientasi pada capaian esensial sehingga sesuai dengan keterbatasan waktu yang dimiliki guru.

- b. Mengkaji dan mengembangkan pendekatan pedagogi kolaboratif lintas generasi dalam pengelolaan pembelajaran yang mampu menghargai pengalaman guru berusia lanjut sekaligus mendorong terjadinya proses saling belajar antarguru.
- c. Memperkuat landasan teoretis mengenai pengembangan profesional guru yang menekankan pentingnya pelatihan secara langsung (*offline*), interaksi sosial, dan praktik reflektif sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi pendidik dalam implementasi Kurikulum Merdeka.
- d. Mengembangkan kajian teoretis tentang pembelajaran kontekstual dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan lingkungan sekitar sebagai bahan utama dalam proses pembelajaran dan pembuatan produk.

## 2. Secara Praktis

- a. Mengarahkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya pada aspek teknis pembelajaran, tetapi juga pada proses dialog dan refleksi kritis yang mengangkat realitas sosial siswa, termasuk isu ketidakadilan sosial dan gender.
- b. Menciptakan iklim kelas yang aman, inklusif, dan setara dengan menyusun kesepakatan kelas melalui dialog bersama siswa serta menafsirkannya secara humanis agar tidak membatasi keberanian siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan berpikir kritis.
- c. Mengelola sarana dan prasarana sekolah dengan perspektif kesetaraan dan kemandirian siswa sehingga mampu mendukung terciptanya lingkungan belajar yang humanis serta bebas dari relasi kuasa yang mengekang.
- d. Mengarahkan guru fasilitator P5 untuk menekankan pembentukan kelompok yang adil, pembagian peran yang jelas, serta melakukan refleksi kelompok secara rutin guna menumbuhkan solidaritas, tanggung jawab bersama, dan partisipasi aktif seluruh anggota kelompok.